Hubungan Arab Saudi dan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik Tahun 2017
(*Saudi Arabia and Qatar Liason After The Severance of Diplomatic Relation In 2017*)

Astri Audina Savitri, Budi Mulyana, S.IP, M.Si.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung, 40132, Indonesia

Email:

hi.audilvn@gmail.com@gmail.com

Abstract

The background of this research is the unilateral action of diplomatic relations by Saudi Arabia to Qatar. The severance of diplomatic relations was due to an unequal foreign policy between the two countries. The severance of diplomatic relations resulted in blocking Qatar's land, sea and air limits. Not only that, the severance of diplomatic relations by Saudi Arabia to Qatar was also followed by several countries in the Gulf border region, namely the UAE, Egypt and Bahrain. This study aims to describe how the relationship between Saudi Arabia and Qatar after the termination of diplomatic relations in 2017, the researchers also intend to know how the current relationship between Saudi Arabia and Qatar.

Key Words : The Severence of Diplomatic Relation, conflict, Saudi Arabia, Qatar

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah aksi pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar secara sepihak. Pemutusan hubungan diplomatik ini terjadi akibat adanya ketidak selarasan politik luar negeri diantara kedua negara. Pemutusan hubungan diplomatik ini berakibat pada pemblokiran batas darat, laut, dan udara Qatar. Tidak hanya itu pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar juga diikuti oleh beberapa negara di kawasan perbatasan teluk yaitu UAE, Mesir dan Bahrain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hubunga antara Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 2017, peneliti juga bermaksud ingin mengetahui bagaimana kondisi hubungan terkini antara Arab Saudi dan Qatar.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Diplomatik, Konflik, Arab Saudi, Qatar

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Interaksi hubungan internasional dalam pembentukan hubungan kerjasama regional baik berlandaskan atas kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Hubungan internasional ini bisa berbentuk kerjasama dalam konteks interaksi kerja sama secara langsung diantara dua negara baik dalam menghadapi masalah ataupun hal yang mengandung kepentingan bersama. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideology, politik, ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2014 : 33).

Hubungan internasional merupakan bagian penting dari isu konflik yang ada didunia internasional. Ini diakibatkan karena adanya persaingan antar negara-negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Konflik dalam kajian hubungan intenasional merupakan salah satu isu yang sangat penting, karena hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat. Dalam kajian hubungan internasional, konflik tidak hanya terjadi antar individu saja, akan tetapi konflik dapat terjadi pada aktor antar negara yang memiliki kepentingan didalamnya. Menurut Stefan Wolff, konflik merupakan fenomena social dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel (Wolff, 2006 : 55).

Dampak adanya konflik antar negara ini adalah pemutusan hubungan antar negara atau yang lebih dikenal dengan pemutusan hubungan diplomatik antar negara. Hal ini adalah dampak terburuk dalam konflik antar negara karena dapat menghambat terhadap pemenuhan kepentingan nasional bagi negara yang terlibat konflik. Pemutusan hubungan diplomatik antar negara itu salah satunya yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tepatnya pada tanggal 5 Juni 2017 lalu. Pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti oleh beberapa negara tetangga yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, kemudian tidak lama Maladewa dan Libia juga mengikuti jejak negara tetangganya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Ketegangan politik antara Qatar dengan Arab Saudi dan sudah berlangsung sejak tahun 1970-an, dengan konflik-konflik yang pada awalnya berputar sebagian besar di sekitar sengketa perbatasan. Saat ini konflik antara Arab Saudi dan UEA dengan Qatar adalah mengenai kebijakan luar negeri Qatar yang memancing kemarahan kedua tetangganya. Terutama sejak

munculnya Arab Springs pada akhir tahun 2010, Qatar telah memposisikan negaranya di belakang berbagai aktor dan aliansi regional yang berbeda dari Arab Saudi, khususnya kelompok islam Ikhwanul Muslimin yang semakin meningkat dan kelompok-kelompok yang dekat dengannya. Arab Saudi menganggap para aktor ini sebagai risiko keamanan bagi kawasan. Qatar juga memperluas hubungan dengan negara tetangganya, Iran. Ini tidak dapat diterima khususnya bagi Arab Saudi, yang merasa terancam oleh kebijakan regional Iran (Sailer, 2017 : 1).

Konflik antara Arab Saudi dan Qatar saat ini adalah konflik lama yang kembali mencuat. Pada tahun 1995 konflik antara Arab Saudi dengan Qatar dimulai dengan ditandai naiknya Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar yang mengkudeta posisi emir sebelumnya yang dikenal dekat dengan Arab Saudi. Hamad bin Khalifa Al Thani ayah emir Qatar saat ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pada saat bersamaan, negeri kecil di ujung sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab ini melakukan pengiriman perdana gas alam cair dari reservoir atau cadangan terbesar di dunia di lepas pantai North Field yang luasnya setara dengan wilayah Qatar (https://geotimes.co.id/kolom/internasional/di-balik-perseteruan-qatar-versus-arab-saudi/ diakses pada 15 Agustus 2018). Krisis diplomatik besar antara Arab Saudi dan Qatar mencuat pada tahun 2014, tetapi diselesaikan setelah konsesi Qatar melalui embargo yang di lakukan oleh Arab Saudi sebagai kesepakatan damai dari sengketa itu. Sedangkan pemicunya adalah pidato oleh emir Qatar yang memuji Iran sebagai "kekuatan penting di wilayah Timur Tengah". Pada tingkat yang lebih dalam, embargo berawal pada tuduhan bahwa Qatar telah mengingkari janjinya pada 2014 untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya lebih dekat dengan kepentingan Arab Saudi. Pada tanggal 5 Juni, tanpa mengeluarkan ultimatum, Arab Saudi menutup perbatasan daratnya dengan Qatar dan tidak memberikan izin pada wilayah udara dan perairan territorial yang berasal dari Qatar. Bahrain juga bergabung dengan embargo terhadap Qatar. Dampak dari embargo tersebut membuat Qatar harus bergantung pada koridor udara dan laut Iran yang mempunyai wilayah cukup sempit. Tuntutan konkret tidak dikomunikasikan sampai delapan belas hari setelah embargo dimulai. Setelah embargo tersebut dikeluarkan Qatar mulai mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, selain itu juga menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan menutup Al Jazeera (Sailer, 2017 : 2).

Pada tahun 2017, secara tiba-tiba Arab Saudi dan negara teluk beserta Mesir kembali menilai bahwa Qatar telah mengabaikan sejumlah isu regional utama dari konflik di Yaman, krisis Suriah, ke Iran dan perang melawan terorisme. Arab Saudi mengatakan mengambil keputusan itu karena "adanya hubungan keterlibatan antara berbagai kelompok teroris dengan Pemerintah Qatar yang ditujukan untuk mendestabilisasi kawasan", termasuk Ikhwanul

Muslimin, Al-Qaida, ISIS dan kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran. Negara-negara itu mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan semua lalu lintas darat, udara dan laut dengan Qatar, mengusir para diplomatnya dan memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan negara-negara Teluk dalam waktu empat belas hari. Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar. Arab Saudi dan Yordania juga telah mencabut lisensi jaringan media Al Jazeera. Bersamaan dengan itu, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk pasukan Qatar akan ditarik dari perang yang sedang berlangsung di Yaman. UAE memperingatkan bahwa setiap simpatisan dengan Qatar akan dipenjara (Institute of Strategic Studies, 2017 : 2).

Propaganda media juga ikut andil dalam proses pemutusan hubungan ini, sebelumnya banyak media yang melansir bahwa Qatar mendanai beberapa kelompok terroris bahkan ada satu media yang membongkar bahwa ada transaksi warga Qatar yang mensupport kelompok Islam Radikal yang ada di Suriah. Sedangkan Qatar menolak mentah-mentah tuduhan tersebut, Qatar menjawab dengan memberikan pernyataan bahwa berita yang dimuat di media itu tidak benar sama sekali dan ntidak berdasar. Propaganda ini juga ikut memanaskan hubungan anatara kedua negara ini dan memuncak dengan langkah Saudi yang memutuskan Hubungan dengan Qatar (https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis _diplomatik_Qatar_2017 diakses pada 3 September 2018).

Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi dan Qatar Saudi mulai menutup perbatasan diikuti dengan negara-negara teluk yang juga ikut menutup perbatasan mereka dengan negara tersebut. Sementara Mesir menutup wilayah udara dan pelabuhan untuk semua bentuk angkutan Qatar. Para diplomat Qatar diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Arab Saudi serta Warga Negara Qatar yang berada di Arab Saudi diberi waktu 14 hari untuk meninggalkan Arab Saudi. Langkah ini juga diikuti oleh negara-megara teluk yang ikut memutuskan hubungan dengan Qatar. Selain itu Arab Saudi juga tidak mengijinkan adanya penerbangan dari atau menuju dan transit di Qatar. Langkah ini sangat berdampak bagi perekonomian Qatar dimana Qatar ialah negara yang mempunyai perusahaan penerbangan tersibuk yaitu Qatar Airlines. Arab Saudi juga mulai memblokir media-media Qatar salah satunya kantor AL-Jazeera yang berada di Ryadh di tutup secara paksa setelah pemutusan hubungan Diplomatik dengan Qatar. Hingga saat ini beberapa negara mencoba menjadi mediator bagi Qatar dan Arab Saudi dalam menyelesaikan ketegangan ini, namun hingga saat ini belum ada negara yang berhasil meredakan ketegangan kedua negara ini, Qatar melalui menteri Luar negerinya menyatakan bahwa negaranya membuka selebar-lebarnya pintu mediasi untuk menyelesaikan

permasalahan ini, karena menurutnya pemutusan hubungan yang dilakukan Arab Saudi dan negara-negara teluk tidak berdasar dan tidak bisa di benarkan. Qatar mengetahui dengan serius bahwa pemutusan hubungan ini sangat berdampak buruk bagi negaranya terutama di bidang ekonomi, dimana tidak lama setelah pemutusan hubungan diplomasi ini harga saham perusahaan-perusahaan Qatar langsung menurun sebesar 7%.(https://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/06/073000726/bursa.saham.qatar.anjlok.pasca-pemutusan.hubungan.diplomatik.6.negara diakses pada 20 Agustus 2018).

Namun Arab Saudi nampaknya tidak begitu mudah untuk diajak berkerjasama, sedangkan mediasi yang beberapa kali dilakukan melalui perwakilan masing-masing negara juga sampai saat ini masih belum bisa berhasil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah Myor

"Bagaimana hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik di tahun 2017?"

Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, maka dapat di rumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar ?
2. Bagaimana respon Qatar terhadap keputusan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik ?
3. Bagaimana peluang rekonsiliasi hubungan kedua negara ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan internasional juga merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara didunia, karena semakin banyaknya masalah-masalah antar negara yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini membuat ketergantungan antarnegara satu dan yang lain. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor)* maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara *(non-state* militer *actor)*. Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama *(cooperation)*, persaingan *(competition)*, dan pertentangan *(conflict)* (Rudy, 2005 : 2).

2.1.1 Hubungan Diolimatik

Dalam prakteknya, tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional. Dalam beberapa kasus, suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional.Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya (Mauna, 2011: 520). Hubungan diplomasi juga merupakan sebuah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

2.2 Politik Luar Negeri

Secara pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Yani, 2007 : 2). Ada beberapa dimensi-dimensi yang mempengaruhi politik luar negeri, dimensi-dimensi yang dimaksudkan diantaranya adalah dimensi struktural, dimensi disposional, dan dimensi internasional yaitu dimensi yang datang dari lingkungan global. Dimensi – dimensi tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh sehingga lahirlah sebuah tindakan sebagai implementasi dari politik luar negeri (Triwahyuni & Wulandari 2017 : 112). Ketiga dimensi ini sangat penting bagi sebuah negara, dimana ketika dimensi ini dapat dijadikan patokan dalam mengambil sebuah keputusan politik luar negeri satu negara itu sendiri. Sebelum membuat sebuah keputusan politik luar negeri tentunya sebuah negara akan mempertimbangkan berbagai hal yang berpedoman tentunya kepada tiga dimensi tersebut.

2.2.1 Hubungan Bilateral

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu. (Perwita dan Yani, 2014: 42).

Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral internasional. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat

dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik (Perwita dan Yani, 2014: 42).

Di tengah arus globalisasi yang berhasil mendobrak segmen kultural dan sekat geografis, sangat memungkinkan untuk terjadinya hubungan antar negara secara luas. Dalam hubungan tersebut, tidak hanya antara suatu negara dengan negara lain yang secara geografis berdekatan, tetapi juga dengan negara-negara lain yang berjauhan karena tingkat urgensitas kebutuhan yang memerlukan akses lintas negara.

2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan juga didasari akan suatu kekuatan yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negrinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu 2009: 163).

2.4 Konflik

Isu konflik tengah menjadi suatu isu global dimana hal ini menyangkut dengan keamanan dan stabilitas dari negara, baik konflik yang terjadi di internal negara maupun konflik yang terjadi antar negara. Konflik merupakan perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak dalam kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai di mana dalam memperjuangkannya terjadi (Surbakti 2010: 10)

Menurut Stefan Wolff, konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan peradaban manusia (Wolff, 2006:2).

2.5 Kerangka Pemikiran

Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar ini merupakan sebuah bentuk pola interaksi yang mana dapat dilihat dari pemikiran dasar hubungan internasional yang didasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Qatar dan dianggap dapat mengancam kestabilan keamanan negara dan kawasan Timur Tengah, dimana Qatar dianggap mendukung organisasi-organisasi teroris yang dapat mengancam keamanan kawasan.

Keputusan Arab Saudi yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar adalah akibat

dari adanya perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Qatar yang bertentangan dengan kepentingan nasional Arab Saudi yang lebih memilih untuk menjaga keamanan regional di Timur Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh Arab Saudi semata-mata demi kepentingan politik luar negerinya di kawasan Timur Tengah yang dinilai sebagai pemimpin kawasan oleh negara lain.

Kebijakan dari Pemerintah Qatar yang dinilai Arab Saudi memberikan dukungan kepada organisasi yang dinilai Arab Saudi sebagai organisasi Terrorisme ini direspon oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan negaranya dan juga di kawasan Timur Tengah dimana dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar ini bertujuan untuk menjauhkan Arab Saudi dari masuknya organisasi-organisasi terorisme yang dapat mengancam keutuhan negara Arab Saudi.

Konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar ini adalah akibat dari adanya perbedaan dan benturan kepentingan dari kedua negara dimana Qatar menjadi salah satu pendukung dari setiap kebijakan Iran, sementara Arab Saudi menjadikan Iran dengan sekutunya sebagai musuh utama di kawasan, hal tersebut menjadikan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembendungan pengaruh Iran dan memerangi setiap kebijakan dan para sekutunya.

Qatar masih mencoba membuka hubungan baik kembali dengan Arab Saudi. Namun hingga saat ini Arab Saudi masih belum membuka pintu diplomasi bagi Qatar. Bahkan beberapa negara yang mencoba menjembatani kedua negara ini sebagai penengah konflik masih belum bisa membawa kedua perwakilan negara ini di dalam satu ruangan yang sama guna mendamaikan kedua negara ini.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

3.1.1 Tinjauan Umum Arab Saudi

Daratan Arab Saudi terdiri dari padang berbatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan, dan sedikit dataran rendah. Tidak ada aliran sungai ataupun danau permanen. Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km). Wilayah Arab Saudi menempati sekitar 4/5 semenanjung Arab atau seluas 2.250.000 km2. Daratan Arab Saudi terdiri dari padang bebatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan, dan sedikit dataran rendah, tidak ada aliran sungai ataupun danau permanen (https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx diakses pada 3 September 2018).

Tidak seperti kebanyakan negara Arab lainnya, Arab Saudi adalah negara yang independen dari kontrol Barat. Otonomi itu telah dicapai sebagian besar karena kekuatan militer pasukan Ikhwan radikal, prajurit gurun yang diorganisasi oleh Abdul al Aziz dan berdedikasi untuk mempromosikan Islam Wahhabi. Pada tanggal 23 September 1932, negara itu dinamai Kerajaan Arab Saudi, negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasional dan Al-Qur'an sebagai konstitusinya (https://www.saudiembassy.net/ history diakses pada 20 Agustus 2018).

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki situs suci umat islam dunia, seluruh warga dunia dating ke Arab Saudi setiap tahunnya untuk berziarah dan melaksanakan ibadah haji, ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam jika sudah mampu. Kehidupan sehari-hari di Arab Saudi didominasi oleh kegiatan yang berlandaskan Islam. Arab Saudi mewajibkan seluruh warga negaranya untuk menjadi muslim, hukum yang berlakupun ialah hukum yang berdasarkan kepada hukum islam.

Bentuk negara Arab Saudi adalah Monarki (kerajaan) dengan pemimpin Raja Salman bin Abdulul-Aziz al-Saud yang telah di lantik menjadi raja pada tanggal 23 Januari 2015. Raja merangkap sebagai Perdana Menteri dan Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Raja Salman bin Abdulul Aziz Al-Saud merupakan anak dari Raja Abdulul Aziz dan lahir pada 31 Desember 1935.

Sistem Pemerintahan Arab Saudi adalah Negara Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Konstitusi Arab Saudi berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1992 ditetapkan Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Berdasarkan hukum Islam (Syariah) yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an & Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadikan system hukum utama dari Arab Saudi (https://www.kemlu.go.id/ jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx diakses pada 20 Agustus 2018).

Ketika Kerajaan Arab Saudi modern didirikan pada tahun 1932, wilayah Semenanjung Arab adalah masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan, terutama ekspor dan perdagangan tanggal yang dihasilkan oleh peziarah yang datang ke Mekkah dan Madinah. Ia tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang dibayangkan oleh pendirinya, Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud. Penemuan minyak dalam jumlah komersial pada tahun 1938 mengubah itu. Segera setelah Perang Dunia II, ekspor minyak yang stabil menyediakan dana untuk membangun infrastruktur dasar jalan, bandara, pelabuhan laut, sekolah dan rumah sakit. Ekonomi pasar bebas Arab Saudi

telah mengalami perubahan luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Disini masyarakat negara Saudi telah berevolusi dari masyarakat pertanian dasar menjadi kekuatan ekonomi regional dan global dengan infrastruktur modern Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan industri dan ekonomi. Kementerian Ekonomi merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang menetapkan tujuan ekonomi jangka panjang (https://www.saudiembassy.net/economy-global-trade diakses pada 3 September 2018).

3.1.1.2 Politik Luar Negeri Arab Saudi

Sebagai negara Islam, tentu politik luar negeri Arab Saudi berkaitan erat dengan islam. Kebijakan yang diambil tentu berdasarkan dengan berpedoman kepada hukum-hukum islam. Secara historis politik luar negeri Arab Saudi diatur oleh empat prinsip utama yaitu integritas territorial, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi dan promosi serta pelestarian bentuk pemerintahan islam monarki. Namun begitu perlindungan dari kekuatan global masih menjadi andalan dengan keterkaitannya dengan Inggris pasca Perang Dunia I sampai pendirian negara Arab Saudi pada tahun 1932. Serta kemitraan Arab Saudi dengan AS yang dijalin pasca Perang Dunia II hingga hari ini.

Politik luar negeri Arab Saudi bisa dilihat dari beberapa fase yang ditandai dengan perkembangannya sebgai sebuah negara. Ideology Arab Saudi yang anti radikalisme dan kombinasi dari ciri-ciri wahabisme yang membentuk beberapa fase dalam politik luar negeri Arab Saudi, fase tersebut mempunyai keterkaitan dan merupakan dimensi-dimensi dari kebijaksanaan dan cita-cita islam. Arab Saudi aktif menjalin hubungan bilateral dengan negara dan beberapa organisasi internasional seperti PBB, GCC, OKI dan organisasi lainnya.

Sasaran utama dari politik luar negeri Arab Saudi saat ini ialah mendukung negara-negara Arab termasuk Palestina melawan Israel. Dukungan ini ditujukan untuk mencapai kedamaian dikawasan negara-negara Arab khusunya di Timur Tengah. Ideologi islam tidak hanya berfungsi sebagai alat politik luar negerinya tetapi juga semakin memperkuat otoritas Arab Saudi sebagai penegai nilai-nilai islam (https://foreignpolicy.com/2017/11/10/meet-the-next-generation-of-saudi-rulers/ diakses pada 3 September 2018).

Pecahnya perang Arab – Israel tahun 1973 menyhebabkan Arab Saudi melakukan embargo minyak ke negara-negara terkemuka yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia politik global. Pengaruh Arab Saudi yang semakin meningkat secara efektif menunjang bagi kepemimpinannya di dunia Arab. Sedangkan hubungan Arab Saudi dengan negara barat seperti Inggris, Prancis dan Jerman Nampak semakin meningkat semakin berjalannya waktu

dimana negara-negara tersebut merupakan pengekspor terbesar senjata bagi Arab Saudi. Arab Saudi juga tergabung dalam GCC yaitu *The Gulf Cooperation Council* dimana Arab Saudi juga merupakan salah satu negara pemimpin di GCC yang merupakan organisasi negara-negara teluk arab. Salah satu keutamaan dibentuknya GCC ini ialah guna sebagai penjaga keamanan kawasan (https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-forrel.htm diakses pada 29 Agustus 2018)

3.1.1.3 Peran Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah

Sehari setelah memenangkan masa jabatan dua tahunan sebagai dewan keamanan PBB Arab Saudi mengatakan bahwa Arab Saudi menolak jabatan tersebut, ini dilator belakangi atas protesnya Arab Saudi terhadap kebuntuan dewan keamanan PBB dalam menghadapi konflik yang terjadi di Suriah. Selain itu Arab Saudi juga berperan aktif dalam pemberantasan elompok-kelompok faham radikal yang bertentangan dangan faham wahabbi yang dianut Arab Saudi.

Salah satu bentuk peran Arab Saudi di Timur Tengah ialah dimana penyelesaian konflik antara Mesir dan Turki, kemudian Arab Saudi juga aktif dalam pengeliminasian pengaruh ikhwanul muslimin di timur tengah, pemberantasan terrorisme dan kelompok-kelompok radikal lainnya. Raja Salman memperkuat komitmen Arab Saudi pada ajaran islam dan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi akan terus berkomitmen kepada ajaran agama islam.

Menanggapi meningkatnya ancaman ekstrimisme dan kekerasan di kawasan Timur Tengah, Raja Salman mengeluarkan pernyataan bahwa beliau mengutuk terrorisme dalam segala bentuk. Raja Salman mengatakan bahwa Arab Saudi akan berfokus pada perang melawan ekstrimisme dan terrorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya (https://www. Saudiembassy.net/press-release/saudi-king-calls-economic-strength-andstability diakses pada 3 September 2018).

3.1.2 Tinjauan Umum Qatar

Qatar masuk dunia Islam sejak Rajanya, Al-Munzir Ibnu Sawi Al-Tamimi memeluk Islam pada abad ke-7. Qatar sangat berperan dalam menyumbang perkembangan Islam. Dengan dipimpin oleh Abu al-Al'a al-Hadrami, armada angkatan laut Qatar merupakan armada yang paling hebat yang digunakan untuk mengangkut tentara ke berbagai wilayah. Kemerdekaan Qatar diberikan Inggris pada tanggal 3 September 1971 yang kemudian berada dibawah pimpinan keluarga Al-Thani (https://www.kemlu.go.id/Qatar/id/Pages/Qatar.aspx diakses pada 1 September 2018).

Qatar adalah sebuah semenanjung yang terletak di luar Arab Saudi di Teluk Arab. Luas wilayah Qatar mencakup 11.437 kilometer persegi. Budaya Qatar mirip

dengan negara-negara lain di Arabia Timur, yang secara signifikan dipengaruhi oleh Islam . (https://www.economist.com/ books-and-arts/2010/12/29/a-smithsonian-in-the-sand diakses pada 1 September 2018).

Qatar dipimpin oleh seorang Emir, yaitu Syekh Hamad Bin Khalifa Al Thani Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani juga memiliki putera mahkota yang juga merupakan Wakil Emir yaitu Syekh Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Kepala pemerintahannya seorang Emir, yaitu Syekh Hamad Bin Khalifa Al-Thani dibantu oleh Perdana Menteri Syekh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani merangkap juga sebagai Menteri Luar Negeri. Emir bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan semua hukum negaranya (http://www.nyulawglobal.org/ globalex/Qatar.html diakses pada 2 September 2018).

Qatar telah menjadi negara dengan kekuatan finansial terbesar dalam beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan PDB tinggi di setiap tahunnya, tetapi harga minyak yang rendah telah mengurangi penghasilan PDB Qatar walaupun hanya sedikit. Qatar adalah satu-satunya anggota the Gulf Cooperation Council yang menghindari defisit anggaran pada tahun 2015, tetapi memiliki defisit $ 12 miliar, 7,8% dari PDB pada tahun 2016.

Keberhasilan Piala Dunia 2022 di Qatar yang juga sukses mempercepat proyek infrastruktur berskala besar seperti sistem metro, sistem kereta ringan, pembangunan pelabuhan baru, jalan, stadion, dan infrastruktur olahraga terkait (http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/52236 diakses pada 3 September 2018) menunjukan bahwa Qatar adalah negara dengan finansial yang cukup baik.

Pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya perekonomian Qatar tidak menunjukkan perubahan menurun yang besar, pada 16 Mei 2018 Qatar National Bank melaporkan bahwa surplus transaksi negara itu melebar menjadi 6,4 persen dari PDB pada kuartal keempat sejalan dengan harga minyak yang lebih tinggi sementara defisit neraca keuangan menyempit. Selain itu Pada 13 Mei 2018 Khamis al Mohannadi, seorang pejabat senior dari Kelompok Menteri untuk Dorongan dan Partisipasi Sektor Swasta menyebutkan bahwa penjualan produk Qatar telah meningkat 300 persen pada kuartal pertama 2018 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 (https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses pada 1 September 2018).

3.1.2.1 Politik Luar Negeri Qatar

Politik luar negeri Qatar terstruktur lebih positif dimana mempromosikan beberapa strategi yang baru pula. Kemajuan diri merupakan strategi utama Qatar yaitu liberalisasi ekonomi, proyek-proyek

luar negeri dan “state branding”. Strategi ketiga ini mendorong Qatar untuk menjadi negara yang kaya, netral dan visioner serta memancing para investor dan para wisatawan sekaligus juga menjembatani hubungan antara Timur Tengah dan Barat terutama dalam upaya perdamaian.

Langkah politik luar negeri Qatar agak tenang jika dibandingkan dengan sikap sebelumnya, yang dapat dikaitkan dengan keinginan Emir muda untuk secara strategis membentuk kebijakan luar negeri Qatar, menggabungkan pendekatan soft dan hard power, sambil mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional yang mendukung kebijakan luar negeri Qatar (http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/52236 diakses pada 2 September 2018).

Qatar adalah negara yang menganut keyakinan Wahhabi dari Salafi, Islam Hanbali. Keluarga yang berkuasa di Qatar berasal dari kelompok suku Arab yang sama (Bani Tamim) sebagai pendiri Wahhabisme, Muhammad bin Abd al-Wahhab dan para pemimpin Qatar telah lama menganut kitab sucinya. Bahkan di abad ke-21 ketika tidak ada apa pun tentang orientasi atau kebijakan Qatar yang berirama dengan pemahaman khas tentang keyakinan Wahhabi puritan, masjid nasional yang dibuka pada 2012 diberi nama setelah al-Wahhab sendiri. Meskipun negara secara keseluruhan menerima masuknya Ikhwanul Muslimin, tanah untuk proselitisasi tidak begitu diterima (https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/10/POMEPS_GCC_Qatar-Crisis.pdf diakses pada 2 September 2018).

3.1.3 Hubungan Arab Saudi dan Qatar Sebelum Pemutusan Hubungan Diplomatik

3.1.3.1 Kondisi Hubungan Arab Saudi dan Qatar Secara Umum

Secara historis, imam Qatar berasal dari Saudi. Namun, karena ketegangan antara kedua negara meningkat pada 1990-an, Kementerian Wakaf Qatar, kantor negara yang bertanggung jawab atas tugas-tugas masjid memberikan tugas yang lebih menonjol kepada para imam non-Saudi. Kedua negara ini tergabung dalam negara GCC (Gulf Cooperation Counci) atau negara-negara di teluk Arab dimana kelompok ini saling bekerjasama antara lain untuk mengelola perbatasan teluk Arab. Namun begitu keanggotaan Arab Saudi dan Qatar di GCC tidak menjadi penghalang bagi kedua negara ini untuk tetap bersaing di perbatasan. Persaingan antara kedua negara ini secara historis dimulai ketika Arab Saudi mengklaim di semenanjung Qatar. Ada banyak kedekatan budaya antara kedua negara. Banyak orang Badui membawa paspor Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara secara resmi adalah penganut Sunni, negara-negara Wahhabi, meskipun Qatar memiliki kebijakan yang lebih ramah terhadap keragaman agama lain dibanding Arab Saudi, yang beberapa orang membandingkan dengan budaya maritim Qatar melawan budaya

padang pasir Arab Saudi (Robert, 2012 : 3).

Pada tahun 1996, Qatar meluncurkan saluran berita satelit Al-Jazeera dan membawa merek baru liputan berita ke wilayah tersebut. Al-Jazeera menggelisahkan para pemimpin Arab dengan isi beritanya yang cenderung menyudutkan beberapa pihak dan kontroversial, dalam bahasa Arab, tentang kontroversi internal dan regional yang sebelumnya tidak terungkap.

Ada beberapa perubahan hubungan yang terjadi pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Selain pemulangan warga negara Qatar oleh Arab Saudi, pelarangan ibadah Haji bagi warga Qatar serta pemblokadean wilayah darat laut udara bagi Qatar di dalam negarapun Qatar mearik peredaran barang-barang buatan Arab Saudi dan negara teluk yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar. Selain itu warga Qatar yang bersekolah di Arab Saudi ikut merasakan imbas dari pemutusan hubungan diplomatik ini karena mahasiswa Qatar yang berada di Arab Saudi ikut dipulangkan ke negara Qatar sebelum menyelesaikan studi nya. Kemudian ini menjadi dasar Qatar melaporkan Arab Saudi sebagai pelanggran Hak Asasi Manusia ke PBB (https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses dapa 1 September 2018).

3.1.2.3 Persaingan Arab Saudi dan Qatar

Persaingan Arab Saudi dan Qatar secara umum terjadi ketika Qatar menemukan ladang gas terbesar di wilayah perbatasan utara Qatar dan seketika menjadikan Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Saudi yang merupakan negara yg secara historis lebih awal berkembang dari Qatar terlihat tidak terima karena hegemoni Arab Saudi yang ingin tetap menjadi negara penguasa dikawasan.

Salah satu arena persaingan Arab Saudi dan Qatar di kawasan ialah persaingan Saudi dan Qatar di Suriah. Qatar awalnya terlibat dengan masalah yang terkait dengan Suriah dengan mengikuti jejak Arab Saudi. Arab Saudi mengubah pendiriannya dari penyesuaiannya untuk menjatuhkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada musim panas 2011, beberapa bulan setelah dimulainya revolusi Suriah, Arab Saudi memimpin Qatar untuk juga meninggalkan usahanya untuk menjembatani perbedaan dengan Assad. Namun Qatar dengan cepat mencari jalan indepen untuk masalah ini (https://www.theguardian.com/world/2011/jul/21/qatar-syria-ian-blackndiakses pada 1 September 2018).

Selian itu Persaingan antara Arab Saudi dan Qatar di Suriah adalah dengan berdirinya Free Syrian Army (FSA). Qatar menjadi tuan rumah

dalam pembentukan Free Syrian Army (FSA), yang terdiri dari tentara dan petugas yang membelot dari tentara negara Suriah, dan FSA menjadi lengan militer Koalisi Nasional setelah peluncuran terakhir. Namun, Arab Saudi secara gigih mencoba untuk menggunakan pengaruh yang lebih besar atas FSA, seperti yang digambarkan oleh perubahan dalam kepemimpinan FSA yang terjadi pada bulan Februari 2014 di mana seorang pemimpin pro-Qatar (Salim Idris) diganti dengan yang pro-Saudi yaitu AbdulIlah al-Bashir (Khatib, 2014 : 9).

Selain itu, baru – baru ini pada Awal tahun 2018 Qatar memutuskan untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara Russia S-400 yang kemudian menjadi konflik lagi bagi Aranb Saudi dimana Arab Saudi menolak keputusan Qatar untuk membeli senjata tersebut karena ditakutkan itu akan menjadi ancaman bagi kawasan, dikabarkan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyampaikan keluhannya terhadap keputusan Qatar ini. Namun bagi Qatar keputusan pengakuisisian senjata ini ialah hak Qatar sebagai negara yang berdaulat (https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses pada 1 September 2018).

3.1.2.3.4 Konflik Arab Saudi dan Qatar yang Berujung Pemutusan Hubungan Diplomati

Awalnya konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar hanya mencakup di wilayah perbatasan negara, namun baru-baru ini di bawah kepemimpinan Emir Qatar yang baru konflik besar antara Arab Saudi dan Qatar mengeruak dikarenakan kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang dianggap Arab Saudi banyak menyeleweng dari perjanjian GCC yang sepakat untuk setiap anggota menyelaraskan kebijakan politik luar negerinya demi kepentingan bersama di kawasan. Selain itu hubungan antara kedua negara itu memburuk di bawah mantan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Raja Saudi dua kali mendukung upaya kudeta terhadap emir Qatar pada tahun 1996 dan 2005, dan semakin melihat Qatar sebagai saingan kekuatan dalam politik regional dan global.

Gejolak Teluk Arab di Qatar memuncak menjadi kemarahan terbuka pada 2011, ketika Qatar dengan cepat merangkul pemberontakan pada masa Arab Spring, khususnya di Mesir, Libya, dan Suriah. Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang melihat salah seorang dari mereka, Mohammed Morsi, secara singkat berhasil menggantikan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa. Untuk bagiannya, Arab Saudi pergi ke belakang militer Mesir, yang menggulingkan Morsi hanya setahun setelah ia terpilih (https://www.npr.org/sections/parallels/2017/06/17/533054129/qatars-crisis-with-saudi-arabia-and-gulf-neighbors-has-decades-long-roots diakses pada 1 September 2018).

Pada bulan Maret 2014, Arab Saudi, bersama dengan Bahrain dan UEA, menarik duta besarnya dari

Qatar, mengklaim bahwa Qatar gagal melaksanakan persetujuan Gulf Co-Ordination Council (GCC) pada bulan November 2013 untuk tidak mendukung kelompok yang mengancam GCC. Arab Saudi menyerukan kepada Emir baru Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dengan ultimatum untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri Qatar dengan negara-negara GCC lainnya. Secara khusus, Arab Saudi mencari perubahan dalam dukungan Qatar untuk Ikhwanul Muslimin, yang dekat hubungan dengan Turki, penentangannya terhadap rezim baru di Mesir, dan dukungannya bagi pemberontak Houthi di Yaman (https://www.theguardian.com/world/2014/mar/ 05/arab-states-qatar-withdraw-ambassadors-protest diakses pada 1 September 2018).

Kemudian pada tangga 5 Juni 2018 Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, yang dinilai Arab Saudi sebagai upaya bagi menjaga keamanan Nasional Arab Saudi yang menuduh bahwa Qatar ada dibalik dari kelompok-kelompok ekstrimisme yang dapat menjaga kestabilan negara dan kawasan. Selain itu saudi juga berusaha untuk memperlihatkan keburukan-keburukan Qatar di negara-negara barat dan berharap negara Barat akan ikut menekan negara Qatar serta mengubah opini publik tentang Qatar (https://foreignpolicy.com/2018/06/04/ qatar-won-the-saudi-blockade diakses pada 1 September 2018).

3.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2.1 Alasan Arab Saudi Memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Pada tanggal 23 November 2012 anggota GCC menandatangani perjanjian untuk tidak memberikan dukungan kepada pihak manapun yang mengancam keamanan dan stabilitas negara-negara anggota GCC baik sebagai kelompok atau individu melalui kerja keamanan langsung atau melalui pengaruh politik dan tidak mendukung media yang bermusuhan. Qatar sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam GCC ini ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun terdapat kebijakan yang di jalankan oleh Qatar membuat negara-negara GCC lainnya menilai Qatar sebagai negara yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada tanggal 5 Maret 2013, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka dari Qatar dikarenakan Qatar dinilai telah mendukung kelompok dan individu yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar serta menutup semua akses perbatasan dengan Qatar (https://gulfnews.com/news/uae/government/uae-saudi-arabia-and-bahrain-recall-their-ambassadors-from-qatar-1.1299586 diakses pada 1 September 2018).

Terdapat beberapa alasan yang dimiliki Arab Saudi, Bahrain dan Uni

Emirat Arab untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, yaitu salah satunya ialah dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin. Tekanan Arab Saudi terhadap Qatar semakin meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Maret 2014, ketika Arab Saudi memimpin dua negara Teluk lainnya, Bahrain dan Uni Emirat Arab, dalam menarik duta besar mereka dari Qatar, menyebabkan malu publik bagi Qatar. Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan meminta negara-negara Eropa untuk ikut menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris. Dan pada bulan Agustus 2014, setelah pengambilalihan oleh brigade Islam yang didukung oleh Qatar dari bandara nasional Libya di Tripoli, Uni Emirat Arab melakukan serangan udara terhadap milisi tersebut. Sementara itu, Arab Saudi mengirim delegasi ke Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab untuk mencoba menyelesaikan ketegangan dengan Qatar dengan pandangan mendorong Qatar untuk menerima "aksi bersama" di Teluk (http://english.alarabiya. net/en/News/middle-east/2014/08/27/High-level-Saudi-delegation-visits-Qatar.html diakses pada 1 September 2018).

3.2.2 Respon Qatar Terhadap Pemutusan Hubungan Diplomatik

Pasca dilakukannya pemutusan hubungan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar, Kementerian Luar Negeri Qatar menanggapi fenomena tersebut dengan mengatakan bahwa "tidak ada pembenaran yang sah" untuk tindakan yang dilakukan oleh empat negara tersebut yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Qatar menganggap bahwa keputusan itu adalah "pelanggaran kedaulatannya". Qatar telah berulang kali menolak tuduhan memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok radikal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah dan menganggap tuduhan tersebut sebagai "tuduhan yang tidak berdasar".

Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah mengatakan Qatar bukan negara yang mudah ditekan oleh negara manapun. Menurut Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah rakyat Qatar siap untuk membela negaranya dan mengharapkan agar krisis antara negara-negara teluk ini tidak sampai dilakukannya intervensi militer (http://www.abc.net.au/news/2017-07-04/qatar-delivers-letter-of-response-after-crisis-deadline-extended/8675510) diakses pada 1 September 2018).

Baik Emir dan Menteri Luar Negeri Qatar telah menegaskan kembali bahwa Qatar bersedia

bernegosiasi dengan negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik tersebut, dan telah memenuhi panggilan dari para pemimpin internasional untuk dialog. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar dan tidak lama setelah pengumuman pemutusan hubungan Arab Saudi kepada Qatar, Arab Saudi mengeluarkan 13 poin daftar tuntutan untuk mengakhiri krisis antara negara-negara Teluk, dan tetap bersikeras untuk menuntut Qatar agar dapat menutup jaringan Al Jazeera, menutup pangkalan militer Turki dan mengurangi hubungan dengan Iran.

Dalam daftar 13-point, negara-negara juga menuntut agar Qatar memutuskan semua hubungan yang dituduhkan dengan Ikhwanul Muslimin dan dengan kelompok-kelompok lain, termasuk Hizbullah, al-Qaeda dan ISIL (juga dikenal sebagai ISIS). Negara-negara itu sekarang memberi Qatar 10 hari untuk mematuhi semua tuntutan, yang juga termasuk membayar jumlah kompensasi yang tidak ditentukan untuk apa yang negara-negara tersebut klaim sebagai ganti kerugian korban jiwa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar (https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html diakses pada 1 September 2018).

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan bahwa daftar 13 tuntutan tidak dapat diterima oleh Qatar telah mengirim surat tanggapan terhadap daftar permintaan dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab. Alih-alih mengikuti persyaratan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi kepada Qatar, Qatar malah membuka hubungan dengan wilayah barat dimana ini bertujuan untuk menyaring dukungan bagi Qatar. 13 tuntutan yang dikeluarkan Arab Saudi itu jelas dilakukan Arab Saudi untu menekan Qatar, menjadikan Qatar sebagai negara yang tetap berada di bawah Arab Saudi dan UAE serta negara teluk lainnya. Pejabat senior pengelola kawasan Teluk yang ikut terlibat dalam krisis ini bahkan mengatakan bahwa keputusan pemblokiran Qatar ini tidak yakin akan membuat Qatar patuh dan merubah kebijakan-kebijakan politik luar negerinya untuk selaras dengan Arab Saudi dan negara teluk lainnya (https://foreignpolicy.com/2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade/ diakses pada 1 September 2018).

Selain itu Qatar juga dinilai berhasil melakukan politik publik dan memenangkan opini publik sejauh ini para warga yang tinggal di Timur Tengah menilai bahwa keputusan pemutusan hubungan diplomatic oleh Arab Saudi kepada Qatar dan tuduhan-tuduhan Arab Saudi yang dijadikan dasar pemutusan hubungan diplomatik

dinilai sebagai konspirasi otokratis melawan aspirasi untuk perubahan politik yang secara konsisten mereka perjuangkan sejak *Arab Springs* di tahun 2011 (https://foreignpolicy.com /2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade diakses pada 1 September 2018)

3.2.3 Upaya Pemulihan Hubungan Kedua Negara

Ada beberapa negara yang menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam krisis diplomatik Arab Saudi dan Qatar ini salah satunya ialah Amerika Serikat, Russia, Prancis, dan Kuwait. Dalam hal ini, Kuwait berusaha menjadi mediator dalam krisis diplomatik yang saat ini tengah terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Krisis diplomatik ini merupakan yang terburuk di kawasan Timur Tengah sejak perang Amerika Serikat (AS) dengan Irak pada 1991 (https://news.okezone.com/read/2017/ 06/06/18/1708670/kuwait-berusaha-mediasi-krisis-diplomatik-qatar diakses pada 1 September 2018).

Adapun hasil dari Kwait yang bersedia menjadi penengah dalam konflik ini ialah dimana Arab Saudi memberikan 13 daftar yang menjadi syarat jika ingin menjalin hubungan diplomatik kembali, daftar tuntutan itu dibawa Emir Kwait dan diberikan kepada Emir Qatar. Daftar tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab untuk Qatar sebagai upaya pemulihan hubungan diplomatiknya adalah :

1. Arab Saudi dan negara – negera teluk yang memiutuskan hubungan diplomatic dengan Qatar meminta Qatar untuk menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran baik itu hubungan kerjasama atau apapun yang berhubungan dengan Iran Qatar harus menghentikan semua kegiatan dengan Iran, selain itu Qatar juga harus menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Pengawal Revolusi Iran dan memutus kerja sama militer dan intelijen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
2. Arab Saudi meminta Qatar untuk segera menutup pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dibangun di Qatar serta menghentikan kerja sama militer dengan Turki.
3. Qatar harus memutuskan hubungan dengan semua organisasi atau kelompok ekstrimis, sektarian dan ideologis, khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIL, al-Qaeda, Fateh al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Lebanon. Serta secara resmi harus menyatakan entitas ini sebagai kelompok teror sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan setuju dengan semua

pembaruan daftar ini di masa mendatang.

4. Qatar harus menghentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara lainnya yang dianggap dapat mengancam keamanan Internasional khususnya kawasan Timur Tengah.
5. Menyerahkan (tersangka terroris) buron dan individu yang dicari dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. membekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, pergerakan, dan keuangan mereka kepada Arab Saudi. Hal ini diminta Arab Saudi dan Negara tetangganya untuk meminimalisir dan mengeliminasi terroris di kawasan.
6. Qatar harus menutup jaringan berita Al Jazeera beserta stasiun afiliasinya atau apapun yang terkait dengan Al Jazeera. Dimana diketahui bahwa jaringan berita Al Jazeera sering kali memuat berita yang menyudutkan Arab Saudi yang juga ini menjadi salah satu ketidak sukaan Arab Saudi kepada Qatar, karena Al Jazeera adalah salah satu jaringan berita yang ikut didanai langsung oleh pemerintah Qatar.
7. Qatar harus mengakhiri gangguan dalam urusan internal negara-negara yang berdaulat. Dalam kata lain Arab Saudi menginginkan Qatar untuk berhenti ikut campur dalam urusan konflik di timur tengah. Qatar juga harus berhenti memberikan kewarganegaraan kepada warga negara yang berpotensi dan diinginkan dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara di mana kewarganegaraan tersebut melanggar hukum negara-negara tersebut.
8. Qatar harus membayar ganti rugi untuk reparasi dan kompensasi untuk korban jiwa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan ditentukan dan dikoordinasikan dengan Qatar.
9. Menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, serta pada masalah ekonomi, sesuai kesepakatan 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi. Dimana perjanjian ekonnomi ini salah satunya adalah dalam pengelolaan gas alam Qatar yang diinginkan Arab Saudi agar Qatar membagi pengelolaan gas alam ini dengan negara GCC bukan dengan negara yang tidak dikehendaki oleh Arab Saudi seperti Iran.
10. Qatar harus menghentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain. Arab Saudi

juga meminta Qatar untuk menyerahkan file yang menjabarkan kontak sebelumnya dengan dukungan untuk kelompok oposisi, dan kirimkan rincian informasi kelompok oposisi yang didukung Qatar informasi ini berupa informasi pribadi mereka serta informasi tentang apa saja daftar dukungan yang diberikan Qatar kepada kelompok oposisi tersebut.

11. Tutup semua outlet berita yang didanai langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby, Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye, dan kantor berita lainnya. Karena Arab Saudi menganggap berita-berita yang dimuat oleh kantor berita tersebut terlalu menyudutkan Arab Saudi dan membuat keresahan bagi warga negara yang tinggal di kawasan Timur Tengah.
12. Qatar harus setuju dengan semua permintaan yang diberikan oleh Arab Saudi dan negara teluk lain yang ikut memutuskan hubungan dengan Qatar dalam tenggat waktu yang ditentukan yaitu 10 hari sejak daftar ini diterima Qatar, atau penawaran itu menjadi tidak berlaku.
13. Qatar harus menyetujui untuk melakukan tinjauan kepatuhan setiap bulan pada tahun pertama setelah tuntutan itu disetujui, diikuti oleh tinjauan setiap tiga bulan pada tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya

(https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html diakses pada 1 September 2018).

Dapat kita lihat bahwa 13 tuntutan diatas sangat menyuduutkan Qatar, maka dari itu Qatar sulit menerima sehingga proses rekonsiliasi hubungan Arab Saudi dan Qatar menjadi lebih a lot dan Nampak sulit untuk diwujudkan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tidak akan ada negosiasi atas daftar tuntutan yang telah diajukan kerajaan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya kepada Qatar untuk mengakhiri krisis regional utama.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Alasan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi kepada Qatar salah satunya dilator belakangi Adanya dugaan dari Arab Saudi terhadap Qatar yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan di kawasan Timur Tengah. Hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin muncul karena adanya ikatan ideologis antara Qatar dengan Ikhwanul Muslimin yang membuat Qatar mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di berbagai negara yang dapat memberikan keuntungan

terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Qatar. Apa yang dilakukan Qatar tersebut dianggap oleh Arab Saudi sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Qatar merespon pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab dengan menggunakan prinsip kebijakan pintu terbuka dimana Qatar bersedia untuk berdialog dengan semua pihak. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya sikap keterbukaan dan kemauan dari Qatar untuk mengatasi krisis diplomatik yang tengah melanda. Sikap Qatar tersebut dibuktikan dengan menerima kunjungan pimpinan Kuwait sebagai negara mediator dalam konflik antara Qatar dengan negara-negara teluk tersebut. Walaupun dengan sikap keterbukaan dari Qatar tersebut tetap tidak dapat dicapai kesepakatan damai dari negara-negara yang terlibat konflik.

Pasca pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar, terdapat upaya untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara dimana Arab Saudi dengan negara-negara anggota GCC lainnya memberikan syarat dan ketentuan untuk dipenuhi oleh Qatar. Terdapat 13 ketentuan yang diajukan oleh Arab Saudi beserta negara-negara teluk yang ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang telah diajukan kepada Qatar untuk dipenuhi agar dapat memperbaiki hubungan antara Qatar dan Arab Saudi.

Dengan pengajuan syarat tersebut membuat upaya rekonsiliasi dari konflik yang terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi semakin berat saja. Hal tersebut dikarenakan 13 syarat yang telah diajukan sangat memberatkan Qatar dan terkesan untuk mengisolasi Qatar di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu syarat utama agar Qatar dapat memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi dan negara teluk lainnya adalah dengan menyelaraskan setiap kebijakan luar negeri Qatar dengan Arab Saudi dalam segala sektor terutama kebijakan yang menyangkut mengenai keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Namun agar resolusi konflik ini dapat tercapai diperlukannya kesepakatan diantara para pihak yang berkonflik. Dengan mengacu kepada 13 syarat yang telah diajukan oleh Arab Saudi beserta Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain ini terkesan kebijakan untuk resolusi yang memberatkan pihak dari Qatar. Atas dasar tersebut perlu adanya kesepakatan baru yang melibatkan semua pihak termasuk Qatar agar dapat tercipta sebuah resolusi yang dapat mempersatukan dan memperkuat hubungan antara negara-negara tersebut.

4.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap mengenai hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pertama, Qatar haruslah sadar bahwa dukungannya terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan kebijakan yang mempunyai dampak yang bisa memberikan keuntungan dan juga memberikan kerugian dimana dengan gagalnya kelompok Ikhwanul Muslimin untuk mendapatkan posisi penting di negara-negara Timur Tengah membuat Qatar harus menerima konsekuensinya dengan di lakukannya isolasi terhadap wilayah darat, udara, dan laut Qatar yang berbatasan langsung dengan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah yang dipimpin oleh Arab Saudi.

Kedua, untuk para peneliti yang akan melanjutkan kajian mengenai permasalahan hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 2017 ini diharapkan dapat melakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda atau menggunakan variabel yang berbeda agar didapatkannya khasanah yang luas dan baru bagi penelitian ini dengan sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangatlah kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan objek dan variabel yang sama agar dapat memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

REFERENSI

Buku

Perwita Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yani, Yanyan Mochamad, 2007. *Politik Luar Negeri*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sailer, Matthias dan Roll, Stephan. 2017. *Three Scenarios for the Qatar Crisis*. Jerman : German Institute for International and Security Affairs.

Rudy, T. May. 2005. Administrasi & Organisasi Internasional. Bandung : Refika Aditama

Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Alumni.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo.

Sitepu, P. Antonius. 2009. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wolff, Stefan. 2006. *Ethnic Conflicts: A Global Perspective.* Oxford: Oxford Uviversity Press.

Robert, David. 2012. "*The Arab world's unlikely leader: Embracing Qatar's expanding role in the region*". Project on Middle East Democracy: Policy Brief

Khatib, Lina. 2014. "*Qatar And The Recalibration of Power In The Gulf*". Woshington : Carnegie Middle East Center

Jurnal

Siddiqa, Arhama. 2017."*Qatar-Gulf Rift: Going Beyond a War of Words*". Islamabad. Institute Of Strategic Studies.

Triwahyuni, Dewi, and Wulandari Agustin, Tine. 2017 "STRATEGI KEAMANAN CYBER AMERIKA SERIKAT." Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 6, no. 1.

Elektronik

https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses dapa 10 Agustus 2018

https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses pada 1 September 2018

https://www.npr.org/sections/parallels/2017/06/17/533054129/qatars-crisis-with-saudi-arabia-and-gulf-neighbors-has-decades-long-roots diakses pada 1 September 2018

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/ 05/arab-states-qatar-withdraw-ambassadors-protest diakses pada 1 September 2018

https://foreignpolicy.com/2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade diakses pada 1 September 2018

https://gulfnews.com/news/uae/government/uae-saudi-arabia-and-bahrain-recall-their-ambassadors-from-qatar-1.1299586 diakses pada 1 September 2018

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/08/27/High-level-Saudi-delegation-visits-Qatar.html diakses pada 1 September 2018

http://www.abc.net.au/news/2017-07-04/qatar-delivers-letter-of-response-after-crisis-deadline-extended/8675510) diakses pada 1 September 2018

https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html diakses pada 1 September 2018

https://foreignpolicy.com/2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade/ diakses pada 1 September 2018

https://foreignpolicy.com /2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade diakses pada 1 September 2018

https://news.okezone.com/read/2017/06/06/18/1708670/kuwait-berusaha-mediasi-krisis-diplomatik-qatar diakses pada 1 September 2018

https://www.aljazeera.com/news/2017/06/arab-states-issue-list-demands-qatar-crisis-170623022133024.html diakses pada 1 September 2018

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/21/qatar-syria-ian-blackndiakses pada 1 September 2018

https://geotimes.co.id/kolom/internasional/di-balik-perseteruan-qatar-versus-arab-saudi/ diakses pada 15 Agustus 2018

https://foreignpolicy.com/2017/11/10/meet-the-next-generation-of-saudi-rulers/ diakses pada 3 Agustus 2018

https://www.economist.com/ books-and-arts/2010/12/29/a-smithsonian-in-the-sand diakses pada 1 September 2018

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/52236 diakses pada 2 September 2018

https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017 /10/POMEPS_GCC_Qatar-Crisis.pdf diakses pada 2 September 2018

https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html diakses pada 1 September 2018

http://www.nyulawglobal.org/ globalex/Qatar.html diakses pada 2 September 2018

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/52236 diakses pada 3 September 2018

https://www.kemlu.go.id/Qatar/id/Pages/Qatar.aspx diakses pada 1 September 2018

https://www. Saudiembassy.net/press-release/saudi-king-calls-economic-strength-andstability diakses pada 3 September 2018

https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-forrel.htm diakses pada 29 Agustus 2018

https://www.saudiembassy.net/economy-global-trade diakses pada 3 September 2018

https://www.kemlu.go.id/ jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx diakses pada 20 Agustus 2018

https://www.saudiembassy.net/ history diakses pada 20 Agustus 2018

(https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx diakses pada 8 september 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis _diplomatik_Qatar_2017 diakses pada 3 september 2018

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/06/073000726/bursa.saham.qatar.anjlok.pasca-pemutusan.hubungan.diplomatik.6.negara diakses pada 20 Agustus 2018